

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peran pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu negara, sehingga aspek pendidikan menjadi salah satu prioritas pengembangan yang dilakukan pemerintah. Pembaharuan dan pengembangan dalam dunia pendidikan harus mampu menghadapi tantangan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal (3) mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Demikian pula pendapat yang diutarakan oleh Sutisna, O. (1989:4) bahwa “tujuan segala kegiatan pembaruan pendidikan adalah terciptanya suatu sistem pendidikan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sedang berkembang akan pendidikan dalam arti kuantitatif serta menjamin lahirnya para lulusan yang secara kualitatif memenuhi harapan masyarakat banyak (efektivitas dan produktivitas)”.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang delapan Standar Nasional Pendidikan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, serta (8) standar penilaian pendidikan. Pasal 3 menjelaskan fungsi

delapan standar ini, yaitu: “Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (Pasal 4).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional”. Pengertian ini mengarahkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia akan bisa tercapai jika melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang salah satu penjabarannya adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan menjabarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ke dalam rencana kerja untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Arah pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, yaitu “... fokus kebijakan dalam periode 2015-2019 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi”.

Kualitas dalam prespektif pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yaitu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai *input*, seperti bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana sekolah, dukungan administrasi dan sumber daya lainnya, serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah setiap kurun waktu tertentu. (Suryosubroto dalam Priansa 2014 hlm 18).

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal merupakan ujung tombak dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan bagi masyarakat. Aspek peningkatan mutu sekolah harus mendapat perhatian yang

lebih agar sekolah dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat tentang pendidikan yang bermutu sehingga sekolah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan harus dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian produktivitas sebuah organisasi.

Hoy & Miskel (2013, hlm. 25) menjelaskan, sebagai suatu sistem sosial, sekolah dibentuk oleh elemen-elemen utama yaitu berupa *input*, lingkungan (proses transformasi), dan *output* yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam kaitannya dengan mutu sekolah, aspek *input*, proses, dan *output* merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam pencapaian mutu sekolah menjadi lebih produktif.

Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses perencanaan, penataan dan pendayagunaan sumber daya untuk merealisasikan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Thomas (1971, hlm 12) mengemukakan bahwa sekolah produktif mencakup tiga fungsi, yaitu : “*the administrator, the phychologist, and the economicst*”. Thomas (1971) menjelaskan *the administrator production function*, yaitu fungsi manajerial yang berkaitan dengan berbagai pelayanan untuk kebutuhan peserta didik dan guru, *the psychologist production function*, yaitu fungsi *behavioral* yang keluarannya merujuk pada fungsi pelayanan yang dapat mengubah perilaku peserta didik dalam kemampuan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual, dan *the economic production function*, yaitu fungsi ekonomi yang keluarannya diidentifikasi dengan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi.

Menurut Sutermeister dalam Suharsaputra (2010, hlm. 147) produktivitas ditentukan oleh kinerja pegawai dan teknologi, sedangkan kinerja pegawai itu sendiri tergantung pada dua hal, yaitu kemampuan dan motivasi. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa kinerja guru merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pencapaian produktivitas sekolah.

Sedangkan menurut Mali dalam Engkoswara dan Komariah (2012, hlm. 42), menyatakan ada 30 faktor yang menjadi variabel produktivitas, yaitu (1) pada level keempat (tertinggi) yang mempengaruhi produktivitas secara langsung

adalah efektivitas (*performance*) dan efisiensi (penggunaan sumber), (2) pada level ketiga, yang mempengaruhi produktivitas secara tidak langsung adalah keterampilan (*skill*), motivasi, metode, dan biaya, (3) pada level kedua, yang mempengaruhi produktivitas terdiri atas kepemimpinan, pengalaman, iklim, insentif jadwal, struktur organisasi, teknologi, dan material, (4) pada level pertama yang paling tidak langsung pengaruhnya atas produktivitas adalah kemampuan, gaya, latihan, kondisi fisik, kesatuan, kesadaran sosial, tingkat aspirasi, proses pembagian tugas, kebijaksanaan, penelitian dan pengembangan, badan usaha dan perlengkapannya, standar dan kuantitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sekolah, diantaranya: (1) Kepemimpinan kepala sekolah, (2) Budaya sekolah, (3) Iklim sekolah, (4) Kinerja Kepala Sekolah, (5) Sarana dan Prasarana, (6) Kinerja mengajar guru, (7) Mutu proses, (8) Supervisi manajerial pengawas sekolah, (9) Perilaku kepemimpinan kepala sekolah, (10) Pembiayaan pendidikan, (11) Kompetensi guru, (12) Mutu Pembelajaran, (12) Insentif dan gaji guru (McMillan, 2005; Komariah, 2014, Widiastuti dkk., 2011; Thomas, 2013; dan Britton & Propper, 2016)

Untuk menghasilkan sekolah produktif, kepala sekolah sebagai pemimpin di suatu satuan pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fattah (2000, hlm. 23) bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengajar dan mempengaruhi semua yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Mulyasa (2004, hlm. 89) menyatakan bahwa kepala sekolah profesional dalam paradigma baru manajemen pendidikan akan memberikan dampak positif dan perubahan yang cukup mendasar dalam pembaruan sistem pendidikan di sekolah. Dampak tersebut antara lain terhadap mutu pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah

yang kuat, pengelanaan pendidikan yang efektif, budaya mutu, *teamwork* yang kompak, cerdas dan dinamis, kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, keterbukaan (transparansi) manajemen, kemauan untuk berubah baik (psikologis dan fisik), evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, responsif dan partisipatif terhadap kebutuhan, dan akuntabilitas.

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya yang tersedia, karena kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tugas ini menjadi lebih kompleks bagi kepala sekolah dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dalam dunia pendidikan sehingga menuntut kinerja yang lebih dan penguasaan secara profesional dari seorang kepala sekolah.

Kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah terkadang belum mencapai hasil terbaik yang diharapkan oleh sekolahnya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah. Berbagai potensi yang dimiliki sekolah terhambat pemberdayaannya karena munculnya kendala-kendala tersebut. Jika semua potensi yang dimiliki sekolah dapat dikembangkan secara optimal melalui kepemimpinan sekolah yang kuat, maka potensi tersebut akan menjadikan sekolah lebih produktif. Kurangnya pengetahuan tentang keterampilan kepala sekolah yang dibutuhkan menjadi kendala untuk mewujudkan sekolah yang produktif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Scheerens dan Bosker bahwa yang membedakan antara sekolah yang berkualitas baik dengan sekolah yang kualitasnya biasa adalah kepemimpinan kepala sekolahnya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Davis dan Thomas dapat disimpulkan bahwa banyak sekolah yang gagal menjadi sukses dan sekolah yang bagus menjadi merosot akibat kualitas kepala sekolahnya (Supardi 2013).

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk melahirkan sekolah produktif diperlukan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki kinerja baik untuk dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sehingga semua elemen yang ada

di sekolah bergerak secara optimal untuk mencapai tujuan sekolah, termasuk di dalamnya sekolah produktif.

Selain kepala sekolah, guru sebagai elemen terdepan dalam mengembangkan potensi peserta didik diharapkan mampu menghasilkan *output* yang berkualitas sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6a dipaparkan kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah "merencanakan pembelajaran/ bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan".

Untuk dapat menciptakan sekolah produktif, diperlukan kinerja yang produktif dari guru dan staf yang ada, salah satunya adalah kinerja mengajar guru. Kinerja mengajar guru dapat terlihat pada saat seorang guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, termasuk persiapannya, baik dalam bentuk program semester maupun persiapan mengajar. Proses belajar mengajar tidak sesederhana seperti yang terlihat pada saat guru menyampaikan materi di depan kelas. Tetapi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus membuat persiapan yang baik, penyampaian yang baik serta melaksanakan penilaian setelah pembelajaran selesai agar pembelajaran dapat terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komariah (2014) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas sekolah adalah kinerja mengajar guru dan dipengaruhi secara tidak langsung oleh kepemimpinan kepala sekolah.

Tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu di Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat berdiri berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten baru yang belum lama berdiri. Daerah yang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, sebelah utara dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, sebelah timur Kabupaten Bandung dan

MOH.Arif Noerdin, 2016

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA MENGAJAR GURU
TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kota Cimahi, serta sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Dalam usianya yang baru menginjak 9 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berbenah dalam bidang infrastruktur agar pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk perbaikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Kajian empirik mengenai Kabupaten Bandung Barat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 yang tersusun dari Indeks Kesehatan, Indeks EYS (*Expected Years of Schooling*), Indeks MYS (*Mean Years of Schooling*), Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 64,27 dan berada dibawah rata-rata IPM Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2010-2014

No	Prov/Kab/Kota	IPM				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kota Bandung	77,49	78,13	78,30	78,55	78,98
2	Kota Cimahi	73,76	74,41	74,99	75,85	76,06
3	Bandung	67,28	67,78	68,13	68,58	69,06
4	Sumedang	66,04	66,16	67,36	68,47	68,76
5	Purwakarta	64,93	65,51	66,30	67,09	67,32
6	Subang	63,54	64,21	64,86	65,48	65,80
7	Bandung Barat	61,34	62,36	63,17	63,93	64,27
	Jawa Barat	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat Tahun 2016

Meskipun IPM Kabupaten Bandung Barat meningkat pada setiap tahunnya namun angka tersebut masih dibawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat sehingga masih tertinggal oleh Kabupaten/Kota lain. Dengan memperoleh IPM di kisaran 64,27 maka Kabupaten Bandung Barat berada pada urutan ke 21 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat

masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Jawa Barat.

Selain itu, fenomena yang ada di daerah penelitian yang terait dengan produktivitas sekolah dapat dilihat dari akreditasi sekolah. Dari 675 sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Bandung Barat, hanya 75 sekolah dasar negeri (11,11%) yang terakreditasi A, 564 sekolah dasar negeri (83,56%) yang terakreditasi B, dan sisanya 36 sekolah (5,33%) terakreditasi C. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Akreditasi Sekolah Dasar Negeri Tahun 2007-2015

No	Kecamatan	Akreditasi			Jumlah
		A	B	C	
1	Cipatat	12	44	3	59
2	Ngamprah	7	34	0	41
3	Gunung Halu	1	35	0	36
4	Cipongkor	6	40	0	46
5	Cipeundeuy	5	34	3	42
6	Cisarua	2	25	1	28
7	Lembang	14	46	2	62
8	Rongga	2	28	5	35
9	Cihampelas	8	31	4	43
10	Cililin	3	35	1	39
11	Saguling	0	14	1	15
12	Parongpong	3	25	1	29
13	Batujajar	4	30	4	38
14	Cikalongwetan	1	56	1	58
15	Sindangkerta	3	38	0	41
16	Padalarang	4	49	10	63
Jumlah		75	564	36	675

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bandung Barat

Jika dilihat dari lulusan siswa kelas 6 sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung Barat, masih ada siswa kelas 6 yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

MOH.Arif Noerdin, 2016

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA MENGAJAR GURU TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.3
Jumlah Siswa, Lulusan, Mengulang, Putus Sekolah, dan Siswa Tingkat VI

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	Siswa Kelas VI	Lulusan	Putus Sekolah	Mengulang
Sekolah Dasar Negeri	161.371	25.819	25.802	17	-

Sumber: Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Barat 2013-2014

Dari tabel 1.3, terdapat 17 orang siswa yang putus sekolah, walaupun hanya 0,07% dari jumlah seluruh lulusan siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat namun berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, salah satu poinnya menjelaskan tentang peningkatan akses dan pemerataan pendidikan melalui rintisan wajib belajar 12 tahun, maka angka putus sekolah ini harus mendapat perhatian untuk dapat diatasi.

Dari segi kualifikasi akademik, masih terdapat guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung Barat yang belum memenuhi kualifikasi S1, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Guru Sekolah Dasar Menurut Ijazah Tertinggi

Jenjang Pendidikan	Guru Menurut Ijazah Tertinggi									
	<SLTA	SLTA Nkeg	SLTA Keg	D-I	D-II	D-III	S1	S2	S3	Jml
Sekolah Dasar Negeri	5	122	712	16	607	796	4.847	130	0	7.235

Sumber: Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Barat tahun 2013-2014

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 guru sekolah dasar negeri yang memiliki kualifikasi S2 sebanyak 130 orang (1,80%), guru yang telah memiliki kualifikasi S1 sebanyak 4.847 orang (66,99%), dan sisanya

sebanyak 2.258 orang guru (31,21%) belum memiliki kualifikasi S1. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya produktivitas sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung Barat.

Temuan lain yang didapat di lapangan mengenai pelayanan dalam pendidikan, (<http://fokusjabar.com/2016/02/12/dprd-bandung-barat-kantongi-8-point-aduan-pelayanan-pendidikan/>), Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat memperoleh delapan poin pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dari sebagian masyarakat mengenai pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan. Dalam kualitas layanan pendidikan, kepuasan masyarakat sebagai salah satu pelanggan dalam pendidikan dapat menjadi salah satu ukuran mengenai baik atau tidaknya kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah.

Salain itu, menurut salah satu Kepala UPTD Pendidikan SD dan PAUD Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa keberadaan guru honorer yang berprestasi jauh lebih rajin dan benar benar mengabdikan dibandingkan dengan guru yang memiliki identitas pegawai negeri sipil. (<http://bandungekspres.co.id/2016/terancam-putus-sekolah/2/>). Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja guru masih memerlukan perhatian untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan perolehan rata-rata hasil uji Kompetensi Guru tahun 2015 Kabupaten Bandung Barat memperoleh rata-rata nilai sebesar 58,89 dan berada pada urutan 14 dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Hasil tersebut dibawah nilai rata-rata provinsi yaitu sebesar 58,97.

Berdasarkan kajian empiris di lapangan serta data-data yang telah disajikan di atas, dapat dilihat bahwa produktivitas sekolah pada sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung Barat berada di bawah kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, walaupun aspek produktivitas sekolah tidak dapat dilihat secara parsial, tetapi saling terkait dalam suatu sistem. Sistem tersebut akan berjalan dengan

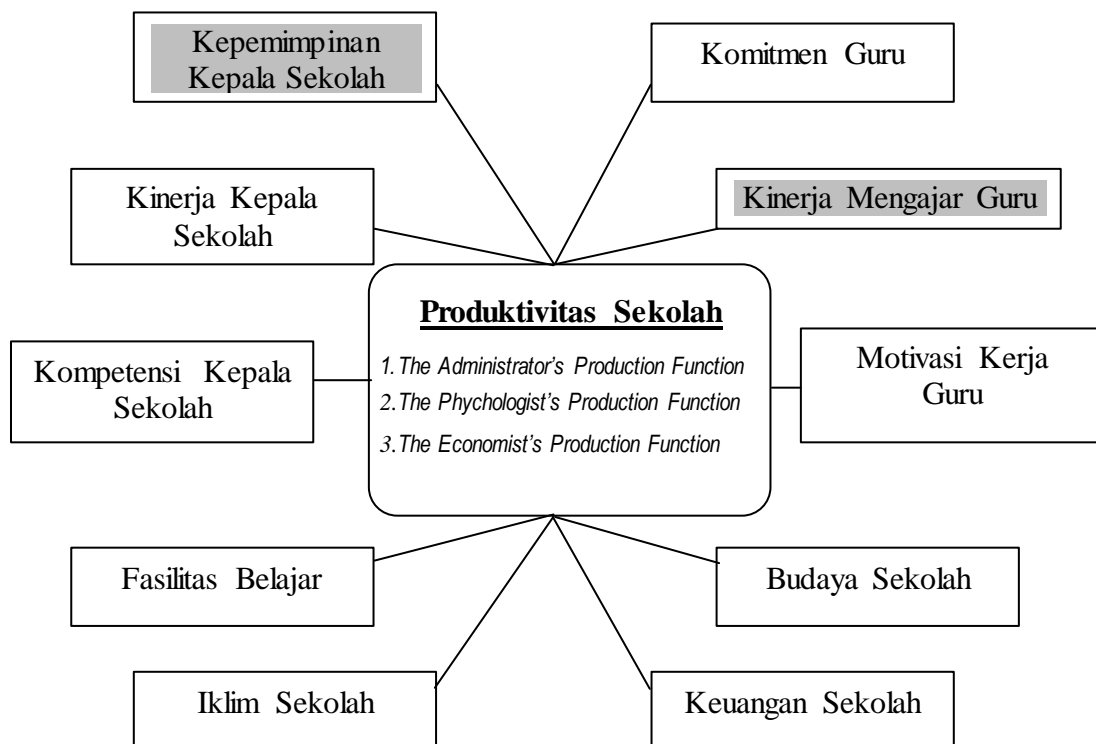
baik apabila semua elemen yang terlibat dalam sistem tersebut mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Peran kepala sekolah sebagai seorang pemimpin diharapkan mampu mengembangkan, menggerakkan, dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai sekolah yang produktif. Selain diperlukan peran kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, diperlukan pula optimalisasi kinerja mengajar guru sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan terhadap siswa sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja mengajar guru terhadap produktivitas sekolah pada sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung Barat.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas sekolah, seperti pada gambar berikut:



MOH.Arif Noerdin, 2016

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA MENGAJAR GURU
TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.1 **Identifikasi masalah**

Diadaptasi dari beberapa sumber: Mali dalam Engkoswara dan Komariah (2012, hlm. 42), Sutermeister dalam Suharsaputra (2010, hlm. 147), Mulyasa (2004, hlm. 135).

Berdasarkan gambar 1.1, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sekolah antara lain kepemimpinan kepala sekolah, kinerja kepala sekolah, kompetensi kepala sekolah, komitmen guru, kinerja mengajar guru, motivasi kerja guru, fasilitas belajar, budaya sekolah, iklim sekolah, keuangan sekolah.

Penelitian ini difokuskan pada tiga variabel utama yaitu kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru, dan produktivitas sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah diteliti karena keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola dan memberdayakan seluruh sumber daya yang tersedia. Secara teori, kepemimpinan kepala sekolah memberikan pengaruh terhadap produktivitas sekolah, namun dalam prakteknya memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Kinerja mengajar guru diteliti karena penulis beranggapan bahwa kinerja mengajar guru berkaitan erat dengan pencapaian prestasi siswa secara akademik. Salah satu cara melihat produktivitas sekolah adalah dengan melihat *output* sekolah berupa kuantitas dan kualitas lulusan hasil dari proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Variabel produktivitas sekolah dalam penelitian ini difokuskan pada fungsi produktivitas sekolah berupa fungsi administrasi yaitu layanan terhadap pelanggan pendidikan, fungsi psikologis yaitu perubahan perilaku peserta didik berdasarkan hasil belajar, dan fungsi ekonomi yaitu keuntungan yang diperoleh peserta didik setelah melakukan pengorbanan waktu, uang, tenaga, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah penelitian ini difokuskan pada hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja mengajar guru terhadap produktivitas sekolah, dengan judul **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Mengajar Guru Terhadap Produktivitas Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Bandung Barat”**.

Berdasarkan fokus permasalahan di atas dapat dirinci rumusan-rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana gambaran kepemimpinan kepala sekolah pada sekolah negeri di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana gambaran kinerja mengajar guru pada sekolah negeri di Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana gambaran produktivitas sekolah pada sekolah negeri di Kabupaten Bandung Barat?
4. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap produktivitas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat?
5. Seberapa besar pengaruh kinerja mengajar guru terhadap produktivitas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat?
6. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja mengajar guru secara bersama-sama terhadap produktivitas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka dibuatlah tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja mengajar guru terhadap produktivitas sekolah dasar negeri di Kabupaten Bandung Barat.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan gambaran kepemimpinan kepala sekolah pada sekolah negeri di Kabupaten Bandung Barat.
2. Mendeskripsikan gambaran kinerja mengajar guru pada sekolah negeri di Kabupaten Bandung Barat.
3. Mendeskripsikan gambaran produktivitas sekolah pada sekolah negeri di Kabupaten Bandung Barat.
4. Menganalisis seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap produktivitas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat.

5. Menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja mengajar guru terhadap produktivitas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat.
6. Menganalisis seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja mengajar guru terhadap produktivitas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti di bidang kepemimpinan kepala sekolah, kinerja mengajar guru dan produktivitas sekolah sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, informasi, dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya guna mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Guru.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam proses kegiatan belajar mengajar.

b. Bagi Kepala Sekolah.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam model pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan produktivitas sekolah.

c. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendidikan khususnya pada sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat.

E. Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini terdiri dari Bab I pendahuluan, Bab II kajian pustaka, Bab III metode penelitian, Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, Bab V kesimpulan dan rekomendasi.

BAB I : PENDAHULUAN

MOH.Arif Noerdin, 2016

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA MENGAJAR GURU TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk membahas mengenai produktivitas sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja mengajar guru, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang lokasi, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara statistik dan dibandingkan dengan kajian pustaka dan metode penelitian dari penelitian terdahulu.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan penutup pada penelitian yang berisi kesimpulan dan beberapa rekomendasi dari analisis pada bab IV.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi sumber pustaka yang relevan yang digunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini menyajikan beberapa lampiran penting yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.